



Perancangan Sistem Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website Pada Komisi Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi

Fatima Felawati^{1*}, Serly Dea Alsena², Padilatul Laili³, Khairun Najwa⁴, Dinda Fitrah Noviza⁵

¹⁻⁵ Sistem informasi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^{1*}fatimafelawati@uinjambi.ac.id, ²serlydea098@gmail.com, ³padilatullaili18@gmail.com, ⁴Najwakhairun683@gmail.com,

⁵novizadindafitrah@gmail.com

Abstrak

Komisi Informasi Provinsi Jambi masih menggunakan proses pendaftaran sengketa informasi publik secara manual sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan, risiko kehilangan berkas, dan kesulitan dalam pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan sengketa secara daring. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dirancang menggunakan PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mempermudah proses pendaftaran, pengelolaan data, serta pemantauan status permohonan secara lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Informasi Publik, Komisi Informasi, Pendaftaran Sengketa, Sistem Informasi, Website

Abstract

The Information Commission of Jambi Province still uses a manual public information dispute registration process, resulting in service delays, risk of document loss, and difficulties in data management. This study aims to design a web-based information dispute registration system to facilitate online application submissions. The system was developed using the Waterfall method, which includes requirements analysis, design, implementation, and testing stages. The application was designed using PHP, MySQL, and UML modeling. The results show that the system simplifies the registration process, data management, and application status monitoring more effectively and efficiently.

Keyword : Public Information, Information Commission, Dispute Registration, Information System, Website.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital pada berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat. Implementasi sistem informasi berbasis website memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara daring, terintegrasi, dan dapat diakses kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengelolaan data yang lebih akurat dan efisien (Hidayat & Fauzi, 2022).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik telah dijamin melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan publik (Ottmann & Meker, 2026).

Dalam praktiknya, tidak semua permohonan informasi publik dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik. Untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, dibentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Proses penyelesaian sengketa informasi publik diatur dalam



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi sengketa yang efektif dan terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelesaian sengketa secara cepat, transparan, dan akuntabel (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2019).

Di Provinsi Jambi, pelayanan sengketa informasi publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi yang berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa adalah pendaftaran sengketa informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemohon. Tahap ini menjadi dasar dalam pelaksanaan verifikasi berkas, pengelolaan dokumen perkara, penjadwalan sidang, pemantauan status permohonan, hingga penyusunan laporan administrasi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengelola seluruh proses tersebut secara efektif dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, diketahui bahwa proses pendaftaran sengketa informasi publik masih dilakukan secara konvensional. Pemohon diwajibkan datang langsung ke kantor untuk mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan secara fisik. Mekanisme tersebut menimbulkan berbagai kendala, seperti meningkatnya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan pemohon, terutama bagi masyarakat yang berada di luar Kota Jambi. Selain itu, pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, duplikasi data, serta keterlambatan dalam proses verifikasi dan pengarsipan berkas sengketa.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui perkembangan status permohonan sengketa yang telah diajukan. Pemohon harus menghubungi petugas atau datang kembali ke kantor untuk memperoleh informasi terkait tahapan proses yang sedang berlangsung. Dari sisi administrator, pengelolaan dokumen dan arsip sengketa secara manual juga menyulitkan proses pencarian data, monitoring perkembangan perkara, pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan proses administrasi sengketa secara digital dan terpusat.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis website dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan data. Saiful et al. mengembangkan Sistem Informasi Pengajuan Sengketa Informasi Publik Berbasis Web pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang mampu mempermudah proses pengajuan sengketa dan pengelolaan data secara digital. Issan et al. (2022) mengembangkan aplikasi pengajuan sengketa informasi dan jadwal sidang berbasis web yang membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Hasanah (2022) menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, Maulana (2024) mengembangkan sistem survei kepuasan masyarakat berbasis website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses informasi. Penelitian oleh Aimar Abie (2026) mengenai Sistem Informasi Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berbasis web menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung pengelolaan layanan informasi publik secara lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, Syamia et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, mempercepat pencarian dokumen, serta mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas pengembangan sistem informasi pada bidang pelayanan publik, pengelolaan sengketa informasi, layanan PPID, dan pengarsipan dokumen berbasis website, sebagian besar penelitian masih berfokus pada fungsi tertentu secara terpisah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengembangkan sistem informasi pengelolaan sengketa informasi publik yang mengintegrasikan proses pendaftaran sengketa, pengelolaan dokumen perkara, pemantauan status permohonan, serta penyusunan laporan administrasi dalam satu platform berbasis website pada Komisi Informasi Provinsi Jambi. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan sengketa informasi publik.

Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan metode yang terstruktur agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode Waterfall dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem sehingga sesuai untuk pengembangan sistem yang memiliki kebutuhan fungsional yang jelas (Pressman, 2014). Sementara itu, UML (Unified Modeling Language) digunakan sebagai alat pemodelan sistem karena mampu menggambarkan kebutuhan, proses bisnis, serta struktur sistem secara visual sehingga memudahkan proses analisis dan pengembangan perangkat lunak (Rosa & Shalahuddin, 2018).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website pada Komisi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Sistem yang dirancang diharapkan mampu memfasilitasi proses pendaftaran sengketa secara daring, pengelolaan dokumen secara terpusat, pemantauan status permohonan secara real-time, serta penyusunan laporan secara otomatis. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung transparansi pelayanan dan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jambi.



METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh kebutuhan sistem. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode Waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Perancangan sistem menggunakan UML, sedangkan pengujian sistem dilakukan dengan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Tahapan Penelitian



Gambar 1. Alur tahapan penelitian

Tahapan penelitian menggambarkan proses perancangan dan pengembangan Sistem Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website pada Komisi Informasi Provinsi Jambi menggunakan metode Waterfall yang dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi sistem. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. **Identifikasi Permasalahan:** Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pendaftaran sengketa informasi yang sedang berjalan melalui observasi lapangan.
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem.
3. **Analisis Kebutuhan:** Menganalisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan data yang telah diperoleh.
4. **Perancangan Sistem:** Merancang sistem menggunakan UML, perancangan basis data, serta desain antarmuka pengguna sebagai acuan pembangunan sistem.
5. **Implementasi Sistem:** Membangun sistem pendaftaran sengketa informasi berbasis website sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.
6. **Pengujian Sistem:** Melakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.
7. **Evaluasi Hasil:** Mengevaluasi hasil implementasi dan pengujian sistem untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kebutuhan

a. Sistem yang berjalan

Flowchart sistem pendaftaran sengketa informasi yang berjalan masih dilakukan secara manual, mulai dari pengisian formulir, penyerahan berkas, verifikasi dokumen, hingga pencatatan dan penyimpanan data oleh petugas. Adapun alur sistem yang berjalan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Jambi.
- 2) Pemohon mengambil formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- 3) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan.
- 4) Pemohon menyerahkan formulir dan dokumen kepada petugas.
- 5) Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
- 6) Jika berkas belum lengkap, pemohon diminta melengkapi persyaratan.
- 7) Petugas mencatat data pemohon dan data sengketa.
- 8) Dokumen fisik disimpan sebagai arsip.
- 9) Pemohon menunggu informasi jadwal mediasi atau adjudikasi.
- 10) Proses pendaftaran sengketa informasi selesai.

b. Sistem yang diusulkan

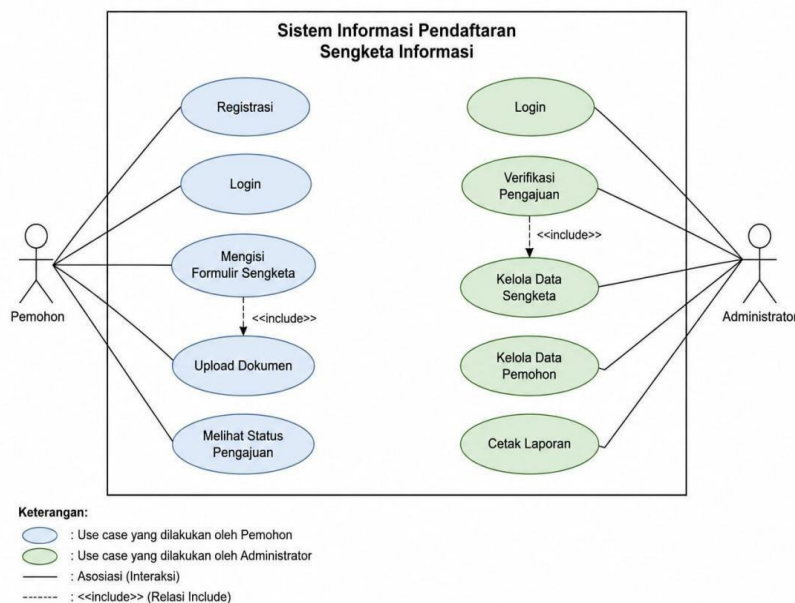
Flowchart Sistem Informasi Pendaftaran Sengketa Informasi yang diusulkan bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan sengketa informasi secara online. Adapun alur sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengakses website Sistem Informasi Pendaftaran Sengketa Informasi.
- 2) Pemohon melakukan registrasi akun dan login ke dalam sistem.
- 3) Sistem memvalidasi data pengguna.
- 4) Pemohon mengisi formulir pengajuan sengketa informasi.
- 5) Pemohon mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.
- 6) Sistem menyimpan data pengajuan ke dalam database.
- 7) Administrator melakukan verifikasi data dan dokumen pengajuan.
- 8) Sistem memperbarui status pengajuan sengketa.
- 9) Pemohon memantau perkembangan status pengajuan melalui sistem.
- 10) Administrator mengelola data sengketa dan menyusun laporan.
- 11) Sistem menghasilkan laporan data sengketa secara otomatis.
- 12) Proses pendaftaran dan pengelolaan sengketa informasi selesai.

Perancangan Sistem

a. Use Case Diagram

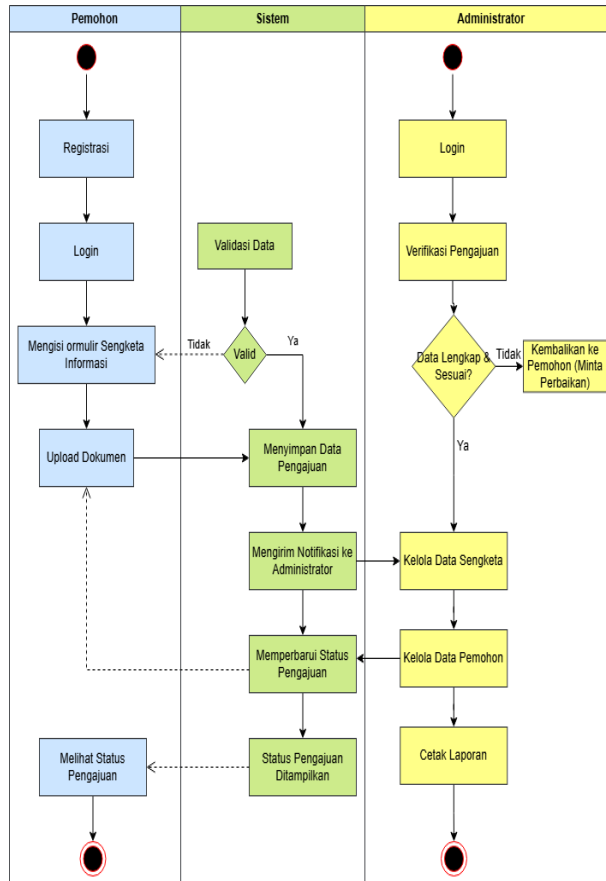
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Pemohon dan Administrator dengan sistem. Pemohon dapat mengajukan sengketa dan memantau status pengajuan, sedangkan Administrator mengelola, memverifikasi, dan mencetak laporan data sengketa.



Gambar 2. Use Case Diagram

b. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses mulai dari pengajuan sengketa oleh pemohon, validasi data, verifikasi oleh administrator, hingga pembaruan status pengajuan.

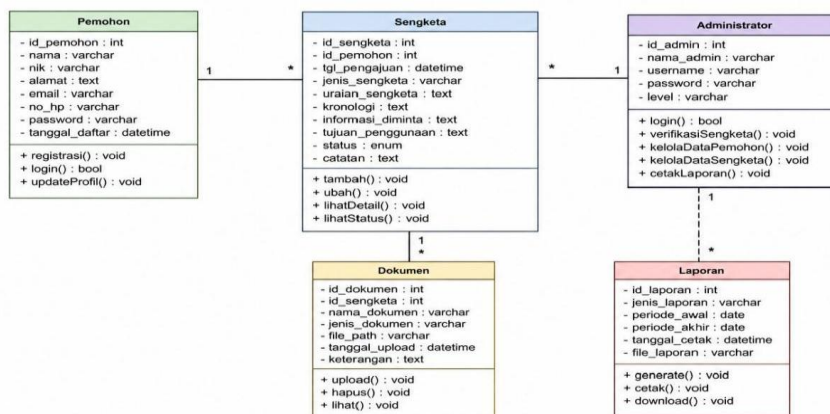


Gambar 3. Activity Diagram



c. *Class Diagram*

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada Sistem Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website serta hubungan antar kelas, seperti kelas Pemohon, Sengketa, Dokumen, Administrator, dan Laporan. Diagram ini menunjukkan atribut, operasi, serta relasi antar kelas sebagai dasar implementasi sistem.



Gambar 4. *Class Diagram*

Implementasi

a. Halaman Registrasi

Halaman Registrasi digunakan oleh pemohon untuk membuat akun baru sebelum mengajukan sengketa informasi.



Gambar 5. Tampilan Halaman Registrasi

b. Halaman Login

Halaman Login digunakan oleh pemohon dan administrator untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password.

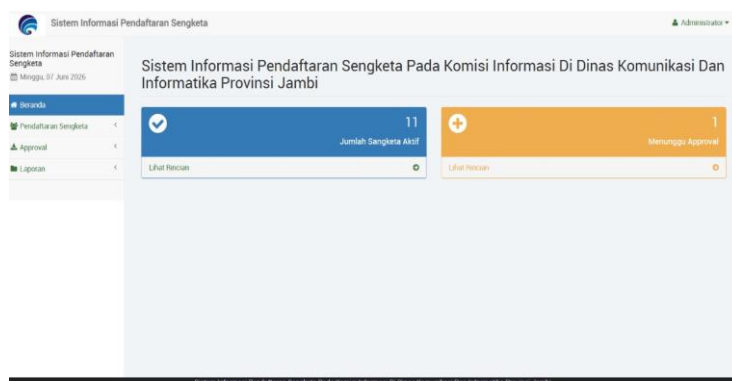


Gambar 6. Tampilan Halaman Login



c. Halaman Beranda

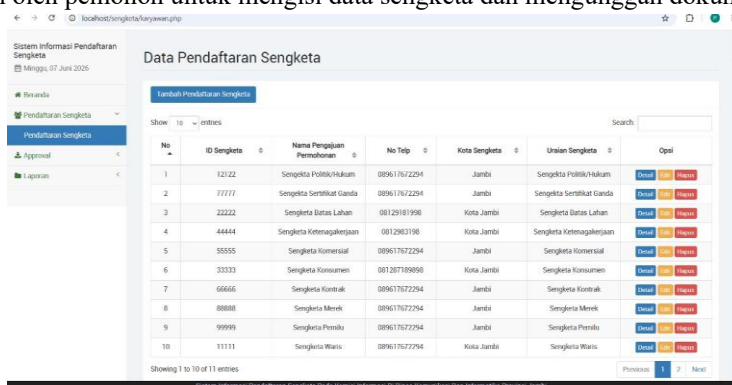
Halaman Beranda menampilkan informasi umum serta menu utama yang dapat diakses oleh pengguna.



Gambar 7. Tampilan Halaman Beranda

d. Halaman Pendaftaran Sengketa

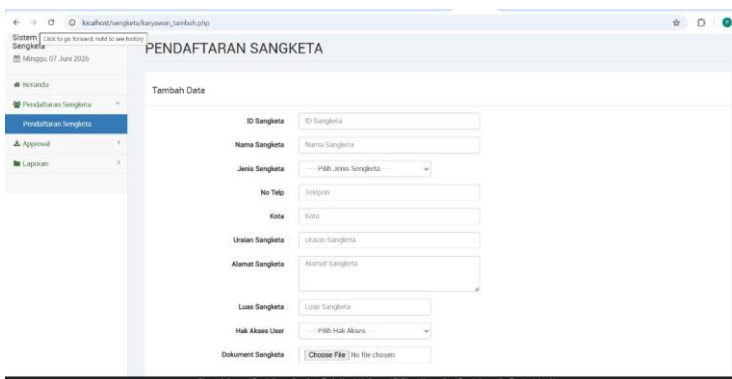
Halaman ini digunakan oleh pemohon untuk mengisi data sengketa dan mengunggah dokumen pendukung.



Gambar 8. Tampilan Halaman Pendaftaran Sengketa

e. Halaman Tambah Data

Halaman ini digunakan untuk menambahkan data pengajuan sengketa informasi ke dalam sistem.



Gambar 9. Tampilan Halaman Tambah Data



f. Halaman Data Approval Sengketa

Halaman ini digunakan oleh administrator untuk melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap pengajuan sengketa yang masuk.

No	No Sengketa	Nama Pemohon Sengketa	Tgl Pengajuan Sengketa	Tgl Awal Pemohon Sengketa	Tgl Akhir Pemohon Sengketa	Opsi
1	12052019195049	Sengketa Konsumen	13-05-2019	14-05-2019	14-05-2019	Detail
2	12052019121722	Sengketa Waris	12-05-2019	14-05-2019	14-05-2019	Detail
3	12052019143232	Sengketa Batas Lahan	12-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	Detail

Gambar 10. Tampilan Halaman Data Approval Sengketa

g. Halaman Semua Data Sengketa

Halaman ini menampilkan seluruh data sengketa yang tersimpan dalam sistem dan dapat dikelola oleh administrator.

No	No Sengketa	Nama Pemohon Sengketa	Tgl Pengajuan Sengketa	Tgl Awal Pemohon Sengketa	Tgl Akhir Pemohon Sengketa	Status Sengketa	Opsi
1	12052019195049	Sengketa Konsumen	13-05-2019	14-05-2019	14-05-2019	Approved	Detail
2	12052019121722	Sengketa Waris	12-05-2019	14-05-2019	14-05-2019	Approved	Detail
3	12052019143232	Sengketa Batas Lahan	12-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	Approved	Detail

Gambar 11. Tampilan Halaman Semua Data Sengketa

h. Halaman Laporan Sengketa

Halaman ini digunakan untuk menampilkan rekapitulasi data sengketa yang telah diproses.

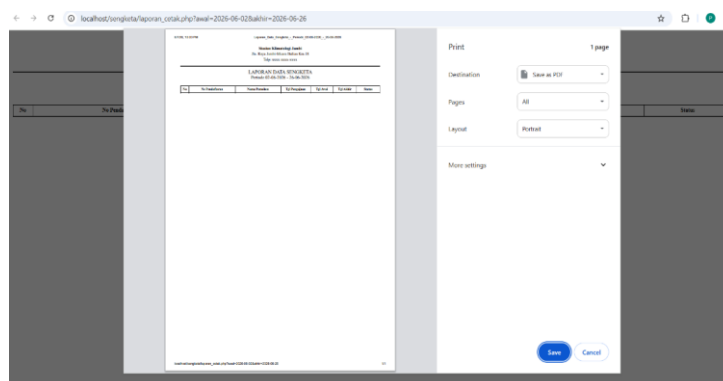
No	No Sengketa	Nama Pemohon	Tgl Pengajuan	Tgl Awal	Tgl Akhir	Status
No data available in table						

Gambar 12. Tampilan Halaman Laporan Sengketa



i. Halaman Cetak Laporan

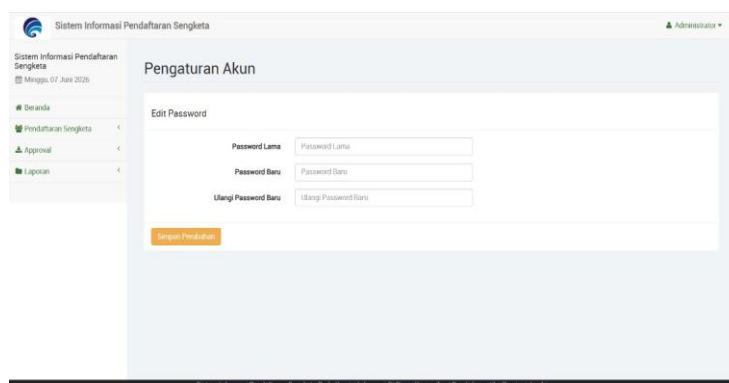
Halaman ini digunakan untuk mencetak laporan data sengketa dalam format yang siap didokumentasikan.



Gambar 13. Tampilan Halaman Cetak Laporan

j. Halaman Pengaturan Akun

Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi profil dan pengaturan akun pengguna.



Gambar 14. Tampilan Halaman Pengaturan Akun

k. Halaman Logout

Halaman Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan dan keluar dari sistem dengan aman.



Gambar 15. Tampilan Halaman Logout

KESIMPULAN

Sistem Pendaftaran Sengketa Informasi Berbasis Website pada Komisi Informasi Provinsi Jambi berhasil dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran sengketa, pengelolaan data, dan pemantauan status pengajuan secara online. Sistem ini mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan serta mendukung penerapan e-Government dalam layanan informasi publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, Komisi Informasi Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Program Studi Sistem Informasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kedua orang tua, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian dan penyusunan jurnal ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aimar Abie, P. (2026). *Rancang bangun sistem informasi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berbasis web menggunakan framework Laravel*.
- Akhriana, A., Faizal, F., & Irmayana, A. (2022). Perancangan E-Government Pelayanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Era Kebiasaan Baru Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. *Telematika: Jurnal Telematika dan Teknologi Informasi*, 19(1), 19-30.
- Dahlia, S., Rahmalisa, U., & Fonda, H. (2022). Aplikasi rekrutmen tenaga ad hoc pemilu tingkat PPK dan PPS berbasis web di KPU Kota Pekanbaru. **Jurnal Ilmu Komputer*, 11*(1), 10–14.
- Hasanah, U. (2022). *Efektivitas implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Issan, C., Pararuk, R., & Rauf, A. (2022). Penerapan aplikasi pengajuan sengketa informasi dan jadwal sidang sengketa informasi berbasis web. **Dipangara Komputer Teknologi Informatika*, 15*(1), 13–23.
- Kuncoro, D. F., Juniarti, U., Syahputra, J., Sumantri, R. B. B., & Suryani, R. (2022). Rancang bangun sistem pengaduan masyarakat berbasis web dengan metode Waterfall. **Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban*, 3*(2), 14–19.
- Maulana, P. A. (2024). *Rancang bangun sistem survei kepuasan masyarakat berbasis website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Nugraha, M. I., Baihaqi, M. A., Wicaksono, P., & Lubis, A. H. (2023). Perancangan sistem informasi pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis website di Kantor Pertanahan Kota Medan. **Technologia: Jurnal Ilmiah*, 14*(2), 94–99.
- Nugroho, A. Y., & Shimbun, A. F. (2023). Peta Tanah Digital: Sistem Inventaris Tanah Berbasis Web Dengan Gis Untuk Pengelolaan Modern Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. *Jurnal Informasi, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 203-216.
- Oktafiani, F., & Wijaya, A. (2021). Sistem informasi pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis web pada dinas pemerintah. **Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6*(2), 210–219.
- Panyili, A., & Khairunnisa, A. (2023). Sistem informasi pengajuan sengketa informasi publik berbasis web pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. **Jurnal Adhi Guna*, 1*(1).
- Putra, P. P. (2021). Perancangan sistem informasi pengajuan layanan publik berbasis web menggunakan metode Waterfall. **Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 10*(2), 115–124.
- Putri, Y. (2025). *Sistem pengelolaan surat permohonan sengketa berbasis website pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Banyuasin* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Setyawan, L. N. B., & Ratama, N. (2023). Sistem pengolahan data pelayanan sertifikasi tanah berbasis web menggunakan metode Waterfall pada kantor kecamatan (Studi kasus: Kecamatan Rajeg). **Journal of Research and Publication Innovation*, 1*(2), 227–232.
- Syamia, N., Lubis, A. S., Zabni, N. H., & Rifqi, M. I. (2024). Web-based document archiving information system in Commission C DPRD of North Sumatra Province. **SAINTEKBU*, 16*(1), 1–14.